

MEMBANGUN MODERASI KEBERAGAMAAN MELALUI PENDIDIKAN

Aris Nur Khamidi

arisnurkhamidi@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Abstract

One of the problems still faced by the Indonesian nation in its 74th year of independence is the emergence of a radical Islamic movement. Historically, the radical Islamic movement has occurred since several decades ago, but until now the radical Islamic movement seems to have not disappeared from the religious and national discourse of Indonesian society. There have been several attempts by the government to reduce the radical Islamic movement, including political, social and economic approaches. Another approach that seems necessary to reduce the radical Islamic movement is to strengthen the building of religious moderation through education.

Keywords: Education, Moderation, Religion

Abstrak

Salah satu masalah yang masih dihadapi Bangsa Indonesia di usia kemerdekaannya yang ke 74 adalah masih munculnya gerakan Islam radikal. Secara historis gerakan Islam radikal sudah terjadi sejak beberapa dasawarsa lalu, namun hingga kini gerakan Islam radikal nampaknya belum juga hilang dari diskursus keberagamaan dan kebangsaan masyarakat Indonesia. Ada beberapa usaha yang sudah dilakukan pemerintah untuk mereduksi gerakan Islam radikal tersebut, diantaranya adalah dengan pendekatan politik, sosial dan ekonomi. Pendekatan lain yang nampaknya perlu dilakukan untuk mereduksi gerakan Islam radikal adalah dengan memperkuat bangunan moderasi keberagamaan, melalui pendidikan.

Kata Kunci : Pendidikan, Moderasi, Beragama

PEMBAHASAN

Pendidikan-sebagaimana disadari secara intelektual-, adalah proses yang amat panjang untuk mewujudkan sebuah perubahan. Jika dinyatakan sebagai aktivitas investasi, sifat investasi pendidikan tidak seperti investasi di dunia bisnis, yang secara matematis dapat dihitung masa balik modal dan besaran keuntungannya. Dalam investasi bisnis pada umumnya modal dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk pertumbuhan barang dan

nilainya, sementara dalam dunia pendidikan, modal dan keuntungan berupa gagasan dan perubahan perilaku yang terjadi pada individu dan masyarakat. Ide dan gagasan pendidikan adalah modalnya, dan perubahan perilaku adalah *benefit* atau keuntungannya (Pemerintah menilai bahwa salah satu masalah di Indonesia adalah kelemahan atau kemiskinan karakter. Untuk mengatasi problem tersebut, pemerintah memiliki gagasan memperkuat pendidikan karakter, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemberlakuan kurikulum 2013. Keberhasilan kurikulum 2013 diukur dari adanya perubahan perilaku bangsa, bukan berhenti pada capaian pengetahuan dan ketrampilan anak didik)

Pendidikan dapat dinyatakan berhasil bukan saja diukur dari seberapa banyak investasi gagasan ditanamkan dan berapa banyak yang diserap oleh *educatee*. Keberhasilan pendidikan bukan pula diukur dari capaian angka, yang dianggap sebagai simbol kualitatif kemampuan seseorang, tetapi seberapa banyak perubahan perilaku yang terjadi pada individu dan sosialnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan investasi pendidikan lebih banyak dan dinamis dibanding faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan investasi bisnis lainnya. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia, *human capital*, yang membutuhkan waktu yang tidak pendek dan instan. Pembangunan pendidikan merupakan investasi sosial yang panjang, yang pada masanya akan bermanfaat dan mendukung proses pembangunan. (Zaenal, dkk, 2014: 96) Karena sifatnya yang demikian, wajar jika tidak banyak yang tertarik dengan investasi di dunia pendidikan tersebut, atau bahkan kurang menyadari bahwa investasi yang manfaatnya panjang adalah investasi pendidikan. Pembangunan infrastruktur fisik lebih populer dibanding pembangunan infrastruktur sumber daya manusia.

Dalam ranah ilmu pendidikan, tujuan pendidikan bukan hanya terjadinya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu (*cognitive domain*), tetapi adalah munculnya perubahan mental (*affective domain*) dan perilaku berkarya yang kreatif, produktif dan lebih baik (*psychomotoric domain*). Pengelompokan tujuan pendidikan menurut Blooms ini, hingga kini banyak digunakan di lembaga pendidikan. (Benjamin S., etc. 1956: 32)

Usaha yang sudah dilakukan pemerintah, dan juga beberapa pihak lain, untuk mereduksi atau menangkal gerakan radikalisme dengan menggunakan pendekatan politik dan keamanan, sudah berjalan cukup lama. Dalam lintasan sejarah penanganan radikalisme, pendekatan politik dan keamanan seringkali disertai dengan alat kekuasaan negara, yakni hukum dan kekuatan militer. Sekarang ini penanganan radikalisme dan terorisme dikoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang berdiri sejak 2010. (<https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt>. Diakses 3/9/2019, 16:30)

Penggunaan pendekatan pendidikan untuk mereduksi gerakan radikalisme, memiliki sifat yang berbeda dengan pendekatan politik dan hukum. Jika pendekatan politik dan hukum lebih banyak –terlihat- pada aksi penindakan, bahkan tidak jarang disertai dengan tindakan represif, pada pendekatan pendidikan lebih banyak melakukan proses dialog dan diskusi di wilayah ilmiah.

Pendekatan pendidikan melihat bahwa munculnya gerakan radikalisme dimulai dengan proses kontruksi berfikir, bahwa banyaknya masalah dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan dimensi kehidupan berbangsa yang lain, –dalam pandangan kelompok radikal-, sudah tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan lain, dan salah satu yang efektif –menurut mereka- adalah dengan gerakan yang paripurna, yakni gerakan radikal.

Dalam konteks filsafat, sikap dan ekspresi keberagamaan yang radikal juga dimulai oleh kontruksi pemikiran bahwa pemaknaan atas teks kitab suci yang benar menurut mereka adalah yang dianggap shahih, solid, dianggap sebagai kebenaran tunggal dan menegasikan adanya pemaknaan dan kebenaran yang lain. Dari sudut sosiologis, *claim of truth* dan *claim of salvation*, telah membuat berbagai konflik sosial politik, yang membawa berbagai perang antar agama, yang sampai sekarang masih menjadi kenyataan di zaman modern ini. (Rahman, 1995: 15) Dalam sejarah agama telah terjadi pertikaian antar pemeluk agama yang sama dan antar pemeluk berbagai agama, namun pertikaian tersebut lebih banyak disebabkan oleh kepentingan-kepentingan non agama. (Shihab, 1998: 147) Kepentingan yang paling sering berisikan dengan agama adalah

kepentingan politik. Dalam banyak momentum, terutama menjelang hajat politik pemilihan umum, mobilisasi massa dan kelompok keagamaan sering terlihat nyata. Mobilisasi masa ini sensitif merangsang terjadinya ketegangan antar umat beragama. (Nashir, 172) Masa di tingkat bawah dijadikan kekuatan atau paling kurang daya tawar politik, dengan energi ideologi agama.

Sikap eksklusivisme-teologis dalam memandang perbedaan dan pluralitas agama, tidak saja merugikan bagi agama lain, tetapi juga merugikan diri sendiri, karena sikap semacam ini sesungguhnya mempersempit bagi masuknya kebenaran-kebenaran baru yang bisa membuat hidup ini lebih lapang dan kaya. (Nashir, 19) Pemikiran dan sikap eksklusif dalam beragama, secara otomatis menutup ruang bagi terbukanya budaya moderat dan interaktif.

Dari logika di atas pendekatan pendidikan bekerja untuk melakukan proses rekonstruksi metodologis dalam berfikir, sehingga lahir epistemologi kebenaran yang tidak lagi hitam – putih, absolut dan tunggal. Ada kebenaran yang bersifat absolut dan mutlak, tetapi manusia tidak sampai pada tingkatan memahami kemutlakan sebuah kebenaran. Manusia hanya sampai pada tingkat keyakinan ilmiah mengenai sebuah kebenaran. Karena sifatnya adalah keyakinan, batini, tidak bersifat empiris mutlak, maka meyakini pula ruang adanya kebenaran yang lain.

Sikap moderat dalam beragama, adalah sikap dimana seseorang meyakini kebenaran agama yang diyakini dengan sepenuh hati, menjalankan perintah agama yang diyakini dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga menyadari ada ruang kebenaran bagi orang lain dan keyakinan yang berbeda. Watak moderat dalam beragama juga ditunjukkan dengan sikap *equality*, kesetaraan, bukan *superiority*, merasa lebih benar dan otoritatif dalam memaknai dan menentukan sebuah nilai.

Sikap moderat dalam mengekspresikan keberagamaan seseorang adalah produk dari proses pendidikan yang panjang. Ada proses wacana dan diskursus yang telah dilalui, dengan metodologi berfikir yang sistematis dan terbuka. Metodologis artinya menggunakan paradigma berfikir yang sistematis dalam mencari dan merumuskan kesimpulan (*thesis*), dan terbuka artinya memiliki sikap obyektif terhadap adanya sudut pandang metodologis dan kesimpulan lain. Sikap moderat

ini adalah hasil dari proses edukasi dan pematangan yang panjang, bukanlah produk instan, yang serta merta muncul dalam diri seseorang. Sikap moderat ini adalah sikap yang dibangun di atas piramida ilmiah dan sikap intelektual yang kuat, bukan dibangun di atas pilar konsep kekuasaan dan politik, yang seringkali instan.

Pendekatan pendidikan untuk sebuah perubahan, dapat dieksperimentasikan dalam dua bentuk kebijakan pendidikan. *Pertama*, mengembangkan desain kurikulum pendidikan yang berorientasi mengkonstruksi epistemologi. Dalam hal ini adalah epistemologi sikap sosial keberagaman yang moderat. *Ke dua*, mengembangkan lingkungan pendidikan sebagai embrio entitas budaya dan peradaban kemajemukan umat beragama.

Desain Kebijakan Pendidikan

a. Desain Kurikulum

Dalam teori kurikulum dinyatakan bahwa ruh atau substansi pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum berisi gambaran proses dan cetak biru (*blue print*) hasil pendidikan. Harapan dan obsesi tentang profil hasil pendidikan, dapat dilihat dari kurikulum yang dikembangkan. Dalam desain kurikulum, gambaran atau profil *out put* pendidikan ini dinyatakan sebagai kompetensi lulusan. Lulusan dari sebuah lembaga pendidikan, diharapkan memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL). Eksistensi kurikulum juga sebagai sarana mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki. Pernyataan tujuan kurikulum sekaligus sebagai koridor pelaksanaan pendidikan. Keberhasilan kurikulum sangat dipengaruhi oleh berbagai sarana, diantaranya tenaga pengajar, sumber belajar, metodologi dan kejernihan tujuan dan arah yang dikehendaki (Tilaar, 1995: 251).

Dalam teori kurikulum didalilkan bahwa kurikulum perlu dikembangkan setiap saat, agar hasil pendidikan senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum tidak boleh statis dan mengeliminasi diri dari dinamika dan realitas sosial. Dalam konteks ini, pendidikan kemudian dapat dimaknai sebagai proses untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam arti luas.

Kurikulum pendidikan juga perlu senantiasa dikembangkan untuk mendorong terjadinya perubahan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, hasil pendidikan dapat diukur dari besarnya perubahan individu

dan implikasinya pada perubahan perilaku diri dan sosialnya. Peran dan makna pendidikan dalam perubahan sosial ini kemudian disebut sebagai peran perubahan atau agen perubahan masyarakat (*social engineering*).

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan desain kurikulum, yakni aspek akademis, sosiologis, psikologis, teknologis, dan filosofis. Pertimbangan akademis dalam pengembangan desain kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu, pengetahuan dan pemikiran yang mutakhir. Pada pertimbangan akademis ini dimaksudkan agar dunia pendidikan mengembangkan domain tujuan pembelajarannya sesuai dengan perkembangan ilmu yang terbaru. Pendidikan tidak semestinya hanya mengajarkan tema dan inti kajian yang sudah mapan (*granted*) saja, tidak berani membangun hipotesa dan postulat baru, sehingga terjebak pada fungsi konservasi pengetahuan.

Sebagaimana sifatnya, ilmu, pengetahuan, pemikiran, teknologi, kebudayaan, senantiasa berkembang sesuai dengan dinamika manusia dalam berinteraksi dengan jagat alam raya. Manusia melakukan peziarahan intelektual untuk mencoba memahmi alam raya yang sangat kaya dan misterius. Setiap tahapan peziarahan manusia menemukan hal baru, yang kemudian ditangkap sebagai sebuah kebenaran. Pada peziarahan berikutnya, manusia menemukan hal baru lagi, lalu menganggap temuan baru tersebut sebagai kebenaran dan mendekonstruksi kebenaran sebelumnya. Demikianlah watak intelektual manusia, dalam berhubungan dengan alam raya dan seisinya (Sejarah penemuan Tuhan Nabi) Oleh karena itu wajarlah pemikiran manusia berkembang setiap saat, sesuai dengan pengalaman belajar yang diperolehnya. Pengalaman belajar akan mengkonstruksi pemikiran, pemikiran akan mengkonstruksi sikap dan perilaku. Oleh karena itu perubahan perilaku –dalam perspektif pendidikan- dimulai dari proses mengkonstruksi pengalaman belajar dan pembentukan pemikiran atau pengetahuan.

Membangun perilaku moderat dalam beragama melalui pendidikan dapat dimulai dengan mendesain – ulang- kurikulum pendidikan yang ada sekarang ini, menuju kurikulum pendidikan yang –lebih- mempercepat terwujudnya masyarakat berkeadaban kosmopolit. Masyarakat kosmopolit diantaranya ditandai dengan

tumbuhnya kesadaran kemanusiaan universal, dan menyadari bahwa terjadinya perselisihan dan konflik disebabkan timbulnya kepentingan, *vested interested*. Pada aspek atau hal-hal fundamental dan universal, manusia bertemu, dan pada hal-hal yang sifatnya peripheral, manusia berbeda pandangan. Konflik seringkali terjadi karena usaha menafsirkan ajaran kebenaran yang universal, dengan membawa kepentingan-kepentingan atau subyektifitas. (Tamara dan Taher, 1996 :43) Kosmopolitanisme (Islam) akan memberikan responsi yang positif dan kuat terhadap tantangan modernitas dan pergaulan global.

Kurikulum pendidikan agama perlu dikaji ; apa tujuan kurikulumnya, apa standar kompetensi lulusan yang diharapkan, apa materi dan pengalaman belajar yang disuguhkan untuk peserta didik, bagaimana metode dan pendekatan pembelajarannya, dan bagaimana pengukuran keberhasilan belajarnya.

Dalam kurikulum pendidikan agama Islam, materi pendidikan agama terdiri dari Aqidah, Akhlak, al-Quran, Hadits, Fiqh dan Sejarah Kebudayaan Islam. Materi belajar tersebut disajikan bagi setiap siswa dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, baik di sekolah maupun madrasah. Masing-masing materi memiliki standar kompetensi lulusan, yang dicapai melalui pembelajaran kompetensi dasar.

Untuk menyuguhkan pendidikan agama Islam kepada anak didik agar memiliki bangunan intelektual yang kuat dan sikap moderat dalam beragama, fokus dan materi pada kurikulum Pendidikan Agama Islam tersebut perlu didesain secara tepat. Pendidikan Agama Islam harus berisi materi pendidikan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan tuntas dalam pembelajarannya. Munculnya sikap superioritas dalam kebenaran, intoleran terhadap kebenaran lain, lalu jauh dari sikap moderat, pada umumnya diawali dari dua faktor. *Pertama* penggunaan sumber belajar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, dan *ke dua*, pembelajaran yang tidak tuntas.

Kurikulum harus berisi sumber belajar yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Sumber belajar Pendidikan Agama Islam adalah al-quran, hadits dan pemikiran ulama yang telah menjadi kesepakatan atau rujukan mayoritas umat Islam. Materi pendidikan Agama

Islam harus disterilkan dari pemikiran dan gagasan yang bertujuan menggunakan Islam sebagai komoditas kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kepentingan lainnya. Sumber belajar tidak boleh hanya berisi wacana atau gagasan atau pendapat pribadi yang dikemukakan oleh seseorang yang tidak otoritatif secara ilmiah, tidak independen dan ada kepentingan subyektif. (Abdullah I, 2013: 122)

Pemikiran pemilihan sumber belajar yang demikian ini bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang keterbukaan ilmiah, tetapi menempatkan kembali aspek fundamental sumber pendidikan agama pada tempatnya. Pemikiran ini juga bukan dimaksudkan untuk mengeliminasi tumbuhnya pemikiran atau interpretasi baru, karena dalam kajian keagamaan juga senantiasa bertemu dengan masalah-masalah baru yang perlu dirumuskan pemikiran hukumnya. Ruang munculnya pemikiran baru terus terbuka, karena tidak semua masalah hukum dan problematika ilmiah, dapat ditemukan jawabannya secara persis dalam sumber utama hukum Islam. Pemikiran baru yang sudah melalui fase timbangan ilmiah, dapatlah kemudian menjadi sumber belajar. Pemilihan sumber yang valid, shahih dan mapan secara ilmiah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias pemikiran dalam pendidikan.

Faktor ke dua yang potensial memunculkan sikap keberagamaan tidak dialogis, tertutup dan monoistik adalah karena seseorang belum tuntas dalam belajar. Seseorang belum tuntas dalam mengkaji sumber belajar, tetapi sudah mengambil keputusan akademis dan moral berdasarkan sepenggal pengetahuan yang dimilikinya. Dalam waktu yang bersamaan, biasanya akan disertai sikap penolakan atau paling kurang keragu-ruguan atau apriori dalam menerima perspektif lain.

Wilayah yang biasanya sering menjadi ruang kontroversi, perdebatan dan akhirnya memunculkan sikap antagonistik adalah fiqh dan aqidah. Sebaliknya jarang terjadi perdebatan ilmiah bahkan hingga menjadi perselisihan di wilayah kajian sejarah dan akhlak. Hal ini terjadi ruang lingkup dan dimensi kajian aqidah dan fiqh lebih luas, multi perspektik dan perlu kajian mendalam. Sumber-sumber belajar aqidah dan fiqh, juga perlu pengkajian lebih cermat, jika dibanding dengan sejarah peradaban Islam. Sekali lagi, pengalaman belajar yang

tidak tuntas, belum mampu memberikan dasar intelektualitas yang mendalam, dan karena itu potensial melahirkan sikap antagonistik, hitam putih, *self otoritatif* dan kurang mampu mengapresiasi keyakinan kebenaran yang lain.

Beberapa peristiwa klaim kebenaran, kekerasan, bahkan radikalisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, diduga kuat dan kemudian disimpulkan berawal dari kurangnya pemahaman keagamaan secara mencukupi. Dalam identifikasi kognitif, Pelaku tindak kekerasan atas nama agama, umumnya belum memiliki pengetahuan yang matang mengenai doktrin agama, berbagai penafsiran dan pemahamannya.

Desain kurikulum pendidikan juga perlu mempertimbangkan aspek sosiologis, yakni mempertimbangkan dinamika kehidupan sosial yang berkembang di masyarakat. Perubahan lingkungan budaya, fisik dan sosial yang terjadi di masyarakat membawa implikasi pada perubahan dimensi kehidupan yang lain. Kontruksi sosial kehidupan masyarakat pada era agraris, industrialis dan era media berbeda. Tantangan dan problematika yang dihadapi masyarakat juga berbeda. Di sinilah pendidikan hadir untuk membantu masyarakat tetap eksis dan *survive* di tengah arus perubahan tersebut. Dalam konteks ini, kurikulum berperan sebagai alat reproduksi kebudayaan (*curriculum as cultural reproduction*). (Abdullah I, 2013: 49)

Pada akhir abad 19, para ahli sosiologi memprediksi bahwa dunia yang luas pada saatnya akan menjadi – terasa- sempit. Batas-batas geografis seakan-akan menjadi semu, untuk tidak dikatakan hilang. Kehidupan penduduk bumi antar belahan makin akrab, interaktif dan saling mempengaruhi. problematika interaksi budaya, ekonomi dan politik dari belahan dunia lain juga dirasakan. Saat ini Bangsa Indonesia sudah merasakan hadirnya jaman impian tersebut. Dunia seakan menjadi sempit, karena hadirnya manfaat teknologi komunikasi. Pada waktu yang bersamaan, Hubungan fisik antar warga dunia ini juga akan disertai dengan hubungan budaya, bahkan ideologi. Dalam suasana yang demikian tersebut dibutuhkan kesiapan untuk mengembangkan budaya dialog, interaksi dan kooperasi. Dialog lintas budaya, pemikiran dan juga ideologi (Bey, 2003: 197).

Saat ini dinamika sosial, politik dan ideologi yang terjadi di belahan dunia manapun dapat terlihat jelas dan *realtime*. Ada negara-negara yang dikenal damai dan minim konflik, seperti Denmark dan Finlandia, ada juga negara yang masih menghadapi problem rasial, seperti menimpa kelompok Muslim Rohingnya, ketegangan diam antara kulit hitam dan kulit putih di sebagian Amerika, konflik militer Suriah, Pakistan, termasuk Yaman. Magnis Suseno menyebut bangsa-bangsa dunia masih menghadapi tantangan universal, yakni demokrasi, tetapi demokrasi dalam makna yang sesungguhnya, bukan claim demokrasi (Suseno, 1996: 135).

Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini selain kompetisi ekonomi dengan negara-negara lain, adalah tantangan ideologi. Bangsa Indonesia harus memiliki bangunan ideologi yang kuat, agar tidak mengalami kebangkrutan ideologi. Dalam tulisan ini digunakan istilah kebangkrutan ideologi, karena pada kenyataannya ada banyak ideologi dan agama yang ada di Indonesia. Masing-masing agama memiliki konsep dan pandangan yang berbeda, bahkan dalam satu agama yang sama, terdapat banyak pemahaman dan pemikiran. Kebangkrutan ideologi akan terjadi ada fusi, penyatuan atau pemaksaan ideologi dan pemikiran mainstream, dan menegasikan yang lain. Dalam kehidupan internal, bangsa Indonesia harus mengembangkan budaya hidup toleran, dalam dalam hubungan eksternal bangsa Indonesia memiliki peran untuk mengkampanyekan perdamaian global. (*Tolerance and caring apply not only in interfaith-relation but also in relations among muslims. A unified ummah is a rahmah for its constituents and a paragon to other countries*) (Yudhoyono, 2006: 108).

b. Desain Budaya

Ada panorama yang menarik dalam pengalaman hidup berkemajemukan di Indonesia namun seringkali luput dari perhatian banyak orang. Panorama tersebut adalah adanya banyak lembaga pendidikan yang dikelola oleh badan swasta, dan khususnya badan swasta tersebut adalah badan swasta keagamaan. Lembaga pendidikan yang dikelola badan swasta keagamaan ada dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh badan swasta keagamaan tersebut membuka kesempatan bagi semua calon mahasiswa dari latar belakang ras dan

agama apapun. Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi tersebut, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan memiliki kebudayaan, bahasa, warna kulit, dan agama yang tidak sama. Banyak perguruan tinggi Kristen, sebagai contoh, di situ terdapat banyak mahasiswa beragama Islam, katolik, Budha, Hindu dan penganut kepercayaan. Banyak perguruan tinggi Islam yang juga memiliki mahasiswa non muslim. Di tingkat dasar (SD) hingga menengah (SMA/K) hal tersebut juga mudah ditemui. Hal yang essential sebagai pembelajaran kemajemukan dalam fakta di atas adalah bahwa sampai saat ini tidak ditemukan data tentang peristiwa konflik atau kekerasan yang terjadi di sekolah dan perguruan tinggi tersebut karena alasan atau motif perbedaan agama. Tidak pula ada kekerasan, perundungan (*bullying*), atau gejolak di dalam lembaga pendidikan yang didorong oleh sentimen keagamaan.

Di dalam lingkungan internal Islam, dapat dilihat perguruan tinggi yang dikelola badan swasta keagamaan atau Ormas Islam tidak membatasi peserta didik hanya untuk komunitas, jamaah atau kelompoknya saja. Sekolah, madrasah dan Perguruan tinggi tersebut terbuka bagi masyarakat dari kelompok atau organisasi keagamaan manapun.

Perguruan tinggi yang dikelola persyarikatan Muhammadiyah tidak mempersyaratkan mahasiswa baru berasal dari warga persyarikatan Muhammadiyah. Perlakuan sosial dan pelayanan akademik juga tidak dibeda-bedakan. Perguruan tinggi yang dikelola Nahdlatul Ulama, juga pesantren-pesantrennya, membuka calon mahasiswa baru dari kelompok organisasi keagamaan manapun. Semua mahasiswa dan santrinya, mendapatkan layanan akademik dan pengasuhan pesantren yang sama. Tidak pernah terjadi konflik antar mahasiswa, juga santri, yang didorong oleh motif perbedaan latar belakang organisasi keagamaan. Perguruan tinggi –perguruan tinggi yang dikelola badan swasta tersebut jumlahnya lebih banyak dibanding perguruan tinggi milik pemerintah tersebut. Mereka telah menjadi inspirasi yang seringkali tak terlihat, dalam menyemai benih kedamaian kemajemukan budaya dan agama.(Saat ini jumlah perguruan tinggi di Indonesia menurut laman Dikti <https://forlap.ristekdikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt> lebih dari 3000, dengan jumlah institut paling banyak.

Jumlah perguruan tinggi swasta lebih banyak dibanding PTN).

Panorama kehidupan damai dan lingkungan budaya etis di perguruan tinggi tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah bahasa universal yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam membangun kehidupan sosial. Realitas ini perlu dikemukakan dan dibaca secara cermat, agar dapat memperkuat pemahaman bahwa pendidikan adalah bahasa universal, yang dapat menjembatani perbedaan dan menyemai benih kebersamaan. Moral, seni, ilmu, dan pengetahuan adalah hal-hal yang bersifat universal. Bahasa universal ini diterima melampaui batas ruang, waktu dan ideologi.

Potret budaya yang demikian harmoni tersebut perlu terus dikembangkan dan disistematisasi, menjadi inkubator pengembangan sikap dan budaya moderat dalam beragama di lingkungan lembaga pendidikan. Di tingkat sekolah, mulai dasar hingga lanjutan atas, dapat dikembangkan budaya moderat dan harmoni antar dan intern umat beragama, sesuai dengan tingkat berfikirnya. Pendidikan kesadaran pluralitas, heterogenitas dan pembiasaan hidup bersama dapat dikemas dalam berbagai model kebudayaan sekolah. Hal seperti ini barangkali lebih mudah dilaksanakan di perguruan tinggi dan sekolah negeri, namun jika diselenggarakan di sekolah swasta keagamaan, akan memberi makna dan dampak psikologis dan ideologis yang lebih mendalam.

Sebagai contoh sederhana, sekolah dapat menyelenggarakan perayaan hari besar agama-agama yang ada. Selain siswa yang sedang merayakan hari besar agamanya, siswa dan warga sekolah lainnya dilibatkan dalam perayaan tersebut. Keterlibatan dan partisipasi pada wilayah sosial, budaya dan moral, relative dapat dilakukan setiap saat dan tidak *debatable*, tanpa mendukung diskusi epistemologik, karena ini bukan wilayah doktrin atau aqidah.

c. Penguatan Kultur Akademik

Salah satu sifat dasar dalam dunia pendidikan adalah adanya ruang untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan secara obyektif. Proses pengembangan ilmu dan pengetahuan, dilewati dengan pengembangan asumsi, hipotesis, eksperimentasi hingga diperoleh kesimpulan. Namun kesimpulan yang sudah diperoleh juga bukan dianggap sebagai akhir dari petualangan intelektual.

Kesimpulan yang sudah dianggap mapan, dapat didiskusikan lagi dan diajukan anti thesis. Demikianlah seterusnya, sehingga dunia ilmu pengetahuan tidaklah berakhir hingga tiadanya lagi kemunculan postulat atau gagasan baru.

Dunia ilmu mengedepankan prinsip keterbukaan dan obyektivitas dalam mengkaji dan mengambil kesimpulan. Prinsip ilmiah menegaskan adanya kepentingan di luar kepentingan sains, meskipun pada ranah aksiologi pertimbangan aspek kemanusiaan seringkali disertakan.

Dalam konteks pengembangan budaya moderasi beragama melalui pendidikan, lembaga pendidikan perlu memperkuat perannya sebagai institusi yang obyektif dan mandiri dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengkajian. Lembaga pendidikan harus mengembangkan budaya akademik yang terbuka, dialogis dan multi perspektif . Lembaga pendidikan tidak boleh memiliki paradig tentang sains, termasuk pemikiran keagamaan, yang tidak sesuai dengan prinsip dan azas-azas ilmiah pada umumnya. Lembaga pendidikan juga tidak boleh mengembangkan paradigma pendidikannya, dengan mendasarkan dan berorientasi pada kepentingan non saintifik.

Implementasi konsep ini pada praktik pendidikan dilakukan dengan penguatan budaya ilmiah dalam pengkajian sumber-sumber belajar agama. Aspek-aspek emosional, ideologis dan subyektifitas bukan berarti dinafikan dan tertutup, tetapi ada pemetaan ruang yang tegas antara aspek obyektifitas dan subyektifitas dalam hal keyakinan atau agama. Sebagai sumber belajar dan konsep yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak (umat), agama terbuka dan dapat dikaji secara ilmiah dan obyektif. Setiap orang, tanpa batas identitas diri dan sosialnya, dapat melakukan studi terhadap konsep dan ajaran sebuah agama. Proses kajiannya tentunya harus dilakukan dengan kaidah dan prasyarat ilmiah. Jika proses dan metodologi yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah ilmiah, maka hasilnya juga bersifat terbuka bagi publik. Persetujuan atau penolakan atas sebuah kajian ilmiah, semata-mata didasari oleh pertimbangan dan kepentingan ilmiah, bukan kepentingan yang lain.

Sikap ilmiah ini tentulah tidak mudah. Bisa dan seringkali terjadi, perbedaan atau ketidaksepahaman terhadap suatu pemikiran keagamaan, perbedaan dalam

menafsirkan makna teks dan aktualisasi sikap keagamaan, dianggap keluar dari mainstream, bahkan dinilai mendekonstruksi kebenaran yang sudah mapan atau malah melawan kebenaran doktrin agama.

Di Indonesia, terdapat banyak organisasi keagamaan. Masing-masing organisasi keagamaan memiliki sumber ajaran, doktrin dan pemikiran, meskipun semua menempatkan al-quran dan al-sunnah sebagai sumber ajaran utama. Setiap organisasi keagamaan juga memiliki paradigma berfikir dan tradisi yang khas dan tidak bisa dipaksakan untuk sama.

Secara konseptual, majelis ulama menjadi ruang untuk mengkaji dan berdiskusi tentang berbagai persoalan hukum, kemaslahatan dan dinamika kehidupan sosial keagamaan umat Islam. Namun demikian pada tataran realitas, sering terjadi perdebatan, perbedaan pemahaman dan sikap yang terkesan - atau sesungguhnya- saling menyalahkan dan mengklaim kebenaran, dalam merespon atau menyikapi masalah-masalah sosial keagamaan. Sikap seperti ini lebih sering muncul di kalangan ummat atau *grassrot*, dan jarang muncul dari kalangan elite agama. Hal ini karena elite agama (*ulama*) memiliki pengetahuan yang cukup tentang persoalan dan dinamika ilmiahnya, sementara hal seperti ini tidak terjadi di kalangan *grassroot*.

Problematika di atas nampaknya dapat diurai dengan memperkuat tradisi ilmiah di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan didorong untuk memperkuat tradisi ilmiah dalam mengkaji sumber dan konsep pemikiran keagamaan. Lembaga pendidikan bukan hanya menjadi penyemai ideologi atau paham keagamaan, tetapi mesti didahului dengan pengkajian sumber belajar yang mencukupi.

Barangkali akan menjadi panorama yang elok, jika sebuah lembaga pendidikan agama, mengkaji berbagai pemikiran keagamaan, termasuk *manhaj* yang digunakan oleh ormas-ormas Islam lainnya, secara terbuka dan obyektif, tanpa disertai dengan sikap apriori dan superioritas. Lembaga pendidikan juga makin elok jika mengembangkan tradisi dialog antar pemikiran keagamaan, atau *interfaith dialogue*. Tujuan dialog bukan untuk menentukan mana yang benar dan salah, dan memberi legitimasi kebenaran, tetapi untuk saling memahami dan menyikapi perbedaan konsep. (Salah satu

metode yang dapat digunakan dalam dialog atau kajian antar Iman adalah metode perennialistik, metode di wilayah filsafat. Komaruddin Hidayat dan Ahmad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, 75. Tetapi hemat penulis, pada ruang yang heterogen secara akademik, dialog dengan pendekatan budaya dapat juga dikembangkan). Jika ini dapat dilakukan, akan muncul kedalaman pengetahuan dan sikap ilmiah yang dialogis, terbuka, yang pada gilirannya menjadi muslim yang moderat dalam interaksi sosial keagamaan.

KESIMPULAN

Di tengah dinamika kehidupan sosial dan politik dalam negeri saat ini, cita-cita Bangsa Indonesia untuk membangun peradaban kebangsaan yang kuat dalam kemajemukan, terutama kemajemukan agama, adalah kebutuhan yang semakin nampak urgensinya. Bukan hanya dalam konteks keIndonesiaan, cita-cita ini juga menjadi urgen di tengah konstelasi peradaban global.

Bangsa Indonesia sudah saatnya mengakhiri diskursus atau wacana pencarian ideologi kebangsaan, dan menemukan wujud akhir jatidiri ideologi kebangsaannya, kemudian beralih fokus berkontribusi pada pembangunan peradaban global. Bangsa Indonesia juga harus menyadari dan menerima banyaknya agama yang ada di Indonesia sebagai takdir sosial.

Bangsa Indonesia butuh sistem ideologi yang kuat untuk meringkai kebhinnekaan agar diterima semua anak bangsa sebagai perekat kebersamaan dan penyatu kepelbagaian. Dalam waktu yang bersamaan pula, Bangsa Indonesia juga butuh sikap ilmiah dan watak budaya kosmopolit, agar dapat meringkai kepelbagaian tersebut bukan karena tuntutan politik atau kewajiban bernegara, tetapi sebagai wujud kesadaran ilmiah dan intelektualitas. Orientasi kehidupan sosial bukan lagi menyatukan ideologi-ideologi keagamaan, tetapi membangun sikap keberagaman yang moderat, agar dapat merawat kehidupan sosial. (Persamaan teologis antara dua agama tidak mungkin ada,... namun persamaan kedudukan ddi muka hukum dapat ditegakkan selama adan yang memberikan perlakuan sama). (Abdurrahman Wahid, Yang Sama dan Yang Benar, dalam, *Atas Nama Agama* : 39)

Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat banguan kebangsaan itu adalah membangun moderasi keberagaman, -utamanya keberagaman dalam ideologi Ketuhanan, melalui pendidikan.

Pendekatan pendidikan ini dapat dimanifestasikan secara sistemik, diantaranya dalam bentuk desain kurikulum pendidikan. Lembaga pendidikan dapat mendesain kurikulum pendidikan, yang mampu melahirkan anak didik yang berwawasan kemajemukan dan bersikap moderat, terbuka, interkoneksi. Pendekatan pendidikan dapat pula berbentuk pengembangan peradaban sekolah (*school as civilization area*), yang berwawasan nasionalisme, internasionalisme, dan religius. Lembaga pendidikan didorong untuk menjadi institusi penyemai benih watak intelektual, sikap ilmiah dan peradaban santun dalam kehidupan sosial keagamaan.

Negara memiliki hubungan yang kuat dengan dunia pendidikan, baik dalam kontek hierarkhi hukum maupun fungsional. Dalam konteks kenegaraan, Indonesia mengenal tujuan pendidikan, dimana tujuan pendidikan dimulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan kurikuler, tujuan pendidikan institusional dan tujuan instruksional. Dalam hierarkhi tujuan pendidikan ini, negara memiliki ruang untuk mendesain kebijakan pendidikan, sesuai dengan kepentingan kebangsaannya. Jika negara melihat fakta bahwa sementara ini ada problem relasi antar dan intern umat beragama dan juga sebagian diantaranya problem ekspresi keberagaman di ruang sosial, maka negara dapat mengambil perannya untuk merekonstruksi arah pendidikan. Sepanjang kebijakan ini dimatangkan melalui proses yang dialogis, bukan otoriter, kebijakan ini dapat dimaknai sebagai pembangunan platform pendidikan keagamaan bersama, bukan intervensi kekuasaan atas ideologi dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi. 2013. *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Ar-ruz Media)
- Abdurrahman Wahid. 2003. *Yang Sama dan Yang Benar, dalam, Atas Nama Agama*. (Jakarta: Gramedia Pustaka)
- Arifin Bey. 2003. *Beyond Civilizational Dialogue, A multicultural Symbiosis in the Service of World*

- Politics*. (Jakarta: Paramadina)
- Benjamin S., etc. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain*. (New York : Longmans, Green and Co)
- Frans Magnis Suseno. 1996. *Demokrasi : Tantangan Universal, dalam Agama dan Dialog Antar Peradaban*, M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed). (Jakarta: Paramadina)
- H.A.R. Tilaar. 1995. *50 Tahun Pembangunan pendidikan Nasional 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Grasindo)
- Haedar Nashir, *Agama dan Mobilisasi Politik Massa*, <https://www.bnpt.go.id/tentang-bnpt>. Diakses 3/9/2019, 16:30.
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Wahyuni Nafis, 1995. *Agama Masa Depan Perspektif filsafat Perennial*. (Jakarta: Paramadina)
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Wahyuni Nafis. 2003. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. (Jakarta : Gramedia Pustaka)
- M Quraish Shihab. 1998. *Agama: Antara Absolutisme dan Relativisme, dalam Atas Nama Agama*, Andito (ed), (Jakarta: Pustaka Hidayah)
- M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher. 1996. *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. (Jakarta: Paramadina)
- Susilo Bambang Yudhoyono. 2006. *Indonesia on The Move*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer)
- Veithzal Rivai Zaenal, SE, dkk. 2014. *The Economics of Education, Mengelola Pendidikan Secara Professional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*. (Jakarta: Gramedia)